



RENCANA KERJA (RENJA)



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayahNYA sehingga Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik.

Rancangan Renja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Barito Kuala ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala Tahun 2017-2022, yang bertujuan untuk menunjang pencapaian Visi Bupati Barito Kuala yakni **“TERWUJUDNYA BARITO KUALA SATU KATA SATU RASA MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA (BATOLA SETARA)”**

Rencana Kerja ini memuat Arah Kebijakan pada tahun 2019 dalam Mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas LH Tahun 2017-2022, arah kebijakan ini diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang akan menjadi landasan konseptual dalam melaksanakan Kewenangan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup.

Semoga Implementasi Rencana Kerja ini Menciptakan indikator sasaran dan kegiatan yang lebih terukur sehingga akan menciptakan akuntabilitas kinerja Dinas yang lebih baik dalam mencapai visi-misi pembangunan.

Marabahan, Juli 2018

KEPALA DINAS

HJ. FAHRIANA,SH,MH
Pembina Utama Muda
NIP 19650414 198601 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Landasan Hukum.....	2
I.3. Maksud dan Tujuan.....	3
I.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018	
II.1. Evaluasi pelaksanaan Renja 2018 dan capaian Renstra.....	6
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor LH.....	12
II.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH.....	14
II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	16
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
III.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional.....	18
III.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas LH.....	19
III.3. Program dan Kegiatan.....	20
BAB IV PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan renja dan pencapaian Renstra DLH s/d tahun 2018	i
Tabel 2.2 Capaian kinerja pelayanan SKPD.....	ii
Tabel 2.3 Usulan program dan kegiatan dari para pelaku kepentingan tahun 2019.....	iii
Tabel 3.1 Rumusan rencana program dan kegiatan DLH Tahun 2019.....	iv

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan Hidup merupakan bagian dari urusan Pemerintahan Konkuren yang termasuk kedalam urusan pemerintahan Wajib Non Pelayanan

Dasar seperti yang termuat pada pasal 12 bagian Urusan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 merupakan bentuk Implementasi Undang - undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanat kan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (Satu) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022. Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017-2022, secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis di bidang Lingkungan Hidup, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana program dan kegiatan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah. Secara umum Rencana Kerja (Renja) merupakan tolak ukur penilaian dan pertanggung jawaban akhir tahun anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan dibidang Lingkungan Hidup serta untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup, karena di dalam format sistem manajemen akuntabilitas pemerintah, **Rencana Kerja (Renja) menjadi salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja instansi pemerintah.**

1.2 Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 antara lain:

1. Landasan Ideal : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Ketetapan MPR Nomor XI/ MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

12. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan LH
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polis Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

1.3 Maksud dan tujuan

1.3.1 maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 sebagai landasan kebijakan strategi tahunan di bidang Lingkungan Hidup melalui suatu rumusan

dokumen perencanaan, yang akan digunakan sebagai acuan bagi pimpinan dan staf dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2019, sekaligus mewujudkan visi dan misi Bupati, dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala.

1.3.2 tujuan

Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis di bidang Lingkungan Hidup selama satu tahun ke depan dengan sumber anggaran APBD, untuk membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan dan staf Dinas LH, dan memperkuat komunikasi, koordinasi antara Dinas LH dengan OPD lainnya guna mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini berisikan gambaran umum penyusunan Renja yang terdiri atas latar belakang penyusunan Renja, Dasar Hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN 2018

Bab ini menyajikan Evaluasi pelaksanaan Renja 2018 dan capaian Renstra 2017-2022, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas LH, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi KLH, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menyajikan Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja KLH, serta menguraikan seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas LH pada Tahun 2019 baik yang bersifat program Prioritas maupun Program Penunjang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menyajikan secara singkat harapan pencapaian dari dokumen Renja yang telah ditetapkan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN 2018

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja 2018 dan capaian Renstra 2017-2022

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala melaksanakan 11 program dan 37 kegiatan dimana kegiatan-kegiatan tersebut tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Tingkat capaian target kinerja program/ kegiatan prioritas sampai dengan desember 2017 dapat terealisasi rata-rata 99,84%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 97,91%.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja DLH Dan Pencapaian Renstra DLH S/D Tahun 2018

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018	Target realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun 2018	Prakiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d 2022		Catatan
					Target renja SKPD tahun 2018	Realisasi renja SKPD tahun 2018	Tingkat realisasi Tahun 2018 (%)		Realisasi capaian	Target capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar/pengarsipan kantor	3.505 lembar	116	701	116	16,55	701	993	233,25	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan listrik, PDAM dan telepon	60 bulan	6	12	6	50,00	12	24	6,00	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah biaya pajak STNK dan KIR mobil/kendaraan yang dibayar	13 buah	1	9	1	11,11	9	11	2,75	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan dan jumlah tenaga kebersihan yang disediakan	17 jenis	7	17	7	41,17	17	31	7,75	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	27 jenis	6	26	6	23,08	26	38	9,50	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis berkas kantor dan jumlah penggandaan yang disediakan	12 jenis	1	10	1	10,00	10	12	3,00	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis pembelian komponen listrik penerangan gedung kantor	10 jenis	0	9	0	0,00	9	9	2,25	
	Penyediaan bahan bacaan dan	Jumlah penyediaan surat							3	0,75	

	peraturan perundang-undangan	kabar harian/media cetak	3 eks	1	3	1	33,3	1			
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makan dan minum untuk harian pegawai, tamu dan rapat	9.592 porsi	3.980	9.592	3.980	41,49	9.592	17.552	4,38	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 laporan/ 365 OK	30	67	30	44,78	67	127	31,75	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi tertentu dengan kecamatan	1 laporan/ 670 OH	25	134	25	18,66	134	184	46,00	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pembelian peralatan gedung kantor	152 buah	0	28	0	0,00	28	28	7,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara dengan kondisi baik	2 unit	1	2	1	50,00	2	4	1,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2, 3 dan 4 yang siap operasional	12 unit	5	10	5	50,00	10	20	5,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dan siap operasional	165 buah	3	33	3	9,09	33	39	9,75	
	Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman	Jumlah luasan taman dilingkungan kantor yang dipelihara dan kondisi representatif	3 lokasi	2	3	2	66,67	3	7	1,75	
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang ditugaskan mengikuti diklat dan meningkat kompetensinya	32 orang	0	2	0	0,00	2	2	0,50	
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen (SAKIP) SKPD yang benar dan tepat waktu	40 laporan/ dokumen	3	8	3	37,50	8	14	3,5	
V	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN										
	Bimbingan teknis persampahan	Jumlah KK yang paham tentang pengurangan penurunan sampah	600 orang	40	100	40	40,00	100	180	45,00	
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah bank sampah yang terbentuk dan aktif	40 bank sampah	2	8	2	25,00	8	12	3,00	
VI	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI										
	Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah	Jumlah pelaksanaan pameran pembangunan	1	1	1	1	100	1	3	0,75	
VII	PROG.PENGENDALIAN PENCEMARAN & PERUSAKAN LINGK. HIDUP										
	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah desa yang dibina	17 desa	2	2	2	100	2	6	1,50	
	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah sampel pemantauan air dan udara ambien	73 sampel	12	29	12	41,37	29	53	13,25	
	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan	42 perusahaan	18	35	18	51,42	35	71	17,75	
	Pengelolaan B3 (bahan Berbahaya dan Beracun) dan limbah B3	Jumlah perusahaan yang melakukan pengelolaan B3	25 perusahaan	3	5	3	60,00	5	11	2,75	
	Pengkajian dampak lingkungan	Jumlah anggota sekretariat komisi/ tim teknis dan komisi penilai Amdal yang kompeten	1 orang	0	1	0	0,00	1	1	0,25	
	Pengembangan produksi ramah lingkungan	Jumlah KK yang memanfaatkan limbah untuk energi	45	0	5	0	0,00	5	5	1,25	
	Koordinasi penyusunan AMDAL	Jumlah masyarakat yang paham tentang pengelolaan	20 orang	0	20	0	0,00	20	20	5,00	
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian	Jumlah kelompok masyarakat peduli	21 kelompok	1	1	1	100	1	3	0,75	

	lingkungan hidup	lingkungan yang terbentuk									
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah terlaksananya kegiatan sosialisasi		2	2	2	100	2	6	1,50	
	Peringatan Hari - Hari Lingkungan Hidup	Jumlah pelaksanaan peringatan hari lingkungan	22 acara	2	4	2	50,00	4	8	2,00	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi: Kab/Kota	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis lingkungan dan berkompeten di bidangnya	22 orang	0	2	0	0,00	2	2	0,50	
VIII	PROG. PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM										
	Pengendalian dampak perubahan iklim	Jumlah pohon yang ditanam di wilayah Kab. Barito Kuala	15.750 pohon	0	1.750	0	0,00	1.750	1.750	437,5	
IX	PROG. REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM										
	Rehabilitasi hutan dan Lahan	Jumlah pohon yang ditanam di kawasan pesisir	13.500 pohon	0	1.500	0	0,00	1.500	1.500	375	
X	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS & AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM & LINGKUNGAN HIDUP										
	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah sekolah yang dibina	32 sekolah	0	3	0	0,00	3	3	0,75	
	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah laporan Menuju Indonesia Hijau	5 laporan	1	1	1	100	1	3	0,75	
	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLDH)	Jumlah laporan Status Lingkungan Hidup daerah (SLHD)	5 laporan	0	1	0	0,00				
XI	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI										
	Pengujian emisi kendaraan bermotor	Jumlah sampel uji emisi sumber bergerak	1.000 sampel	0	100	0	0,00	100	100	25,00	
	Penyuluhan dan pengendalian polusi pencemaran	Jumlah masyarakat yang paham tentang pengendalian polusi	400 orang	0	80	0	0,00	80	80	20,00	

		pencemaran									
	Peningkatan pengelolaan laboratorium	Jumlah sampel yang masuk ke laboratorium	415 sampel	12	50	12	24,00	50	74	18,50	
XII	PROGRAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN										
	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	Jumlah masyarakat yang paham tentang pencegahan kebakaran hutan	400 orang	80	80	80	100	80	240	60,00	
XIII	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU										
	Pemeliharaan RTH	Jumlah luas RTH yang dipelihara	57 Ha	57	57	57	100	57	171	42,75	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan Pelayanan pencegahan pencemaran air.
2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.
3. Pelayanan pemeriksaan / kajian terhadap dokumen lingkungan (AMDAI/UKL-UPL/SPPL).
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
5. Pemberian rekomendasi izin lingkungan
6. Pemberian Izin lingkungan dan penyimpanan sementara limbah B3
7. Memberikan pembinaan terhadap perusahaan agar sesuai dengan dokumen lingkungan perusahaan
8. Melakukan pengurangan timbulan sampah
9. Melakukan pembinaan terhadap sekolah Adiwiyata

Uraian mengenai kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Capaian kinerja pelayanan SKPD

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke					Rasio Capaian Kinerja Tahun Ke				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Indeks Kualitas Air	58,00	58,05	59,00	59,05	60,00	58,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indeks Kualitas Udara	92,78 (IKU)	92,82	92,87	92,92	92,96	89,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Prosentase Pengurangan Timbulan Sampah Skala Kabupaten/Kota	14%	20%	22%	24%	26%	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Prosentase Luasan Penanaman Pohon di lahan terbuka	11,17%	33,39	55,61%	77,83%	100%	16,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH

Dalam Perjalanan selama kurang lebih 5 (Lima) tahun, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala telah melalui beberapa fase perkembangan yang terus meningkat, melalui Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang tata lingkungan, pengendalian dampak lingkungan dan konservasi lingkungan dilakukan melalui Upaya penentuan nilai-nilai strategis dianalisis dengan menggunakan instrument SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities dan Threats). Analisis ini untuk menginstrumenkan masalah serta menentukan sasaran secara teratur dan teruji sesuai dengan kondisi lingkungan baik faktor eksternal maupun internal. Berdasarkan analisis dari potensi dan kondisi yang berkembang dalam ruang lingkup tugas Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Barito Kuala, maka faktor internal dan eksternal tersebut dirumuskan beberapa hal penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala antara lain :

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan (strength)

- Adanya peraturan perundangan dibidang lingkungan hidup baik ditingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten
- Dukungan kebijakan dan regulasi dibidang Lingkungan Hidup baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kab
- Adanya Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dengan struktur dan instrumen untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan
- Tersedianya laboratorium lingkungan dengan sarana dan prasarana sebagai alat pemantauan kualitas lingkungan
- .- Tersedianya Sumber dana APBD dan dana alokasi khusus Kabupaten Barito Kuala
- Tersedianya SDM dari berbagai bidang disiplin ilmu (Teknik Kimia, , Teknik Lingkungan dan Ilmu Kesehatan Masyarakat),

b. Kelemahan (Weakness)

- Masih kurangnya koordinasi, kerjasama, sinergitas dan sinkronisasi program dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).
- Masih kurangnya sinergi antara stakeholder terkait dalam memberikan hal-hal yang bersifat informatif, komunikatif, sosialisasi, dan komitmen yang terus menerus sebagai usaha untuk memberikan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya fungsi lingkungan dalam setiap kegiatan/usaha pembangunan
- Masih kurangnya anggaran
- Keterbatasan Kualitas Sumberdaya Manusia
- Kurangnya disiplin dan kesadaran dari ASN
- Belum terakreditasinya laboratorium Lingkungan Hidup Kab. Batola
- Belum lengkapnya peraturan pelaksana perundang undangan dan masih adanya tumpang tindih peraturan antar sektor
- Kurangnya SDM yang sesuai dengan keahlian di bidang

2. Lingkungan Eksternal

a. Opportunity (Peluang)

- Adanya UU perlindungan lingkungan hidup no. 32 tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat atas haknya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
- Adanya motivasi, keyakinan dan komitmen yang terus tumbuh berkembang dari aparatur pengelola lingkungan hidup untuk meningkatkan kinerjanya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang lebih mengedepankan aspek dan penyelamatan fungsi lingkungan hidup.
- Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan industry dan masyarakat seperti program PROPER, ADIPURA, ADIWIYATA, KALPATARU, NIRWASITATANTRA, PROKLIM dll
- Adanya sektor perbankan yang dapat mendukung program pengendalian pencemaran lingkungan
- Tersedianya akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang dapat memberikan solusi ilmiah untuk mengatasi pencemaran lingkungan.

- Adanya kewajiban dari pihak industri dan pelaku kegiatan usaha lain untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan.
- Adanya tuntutan global terhadap pelaku usaha untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan.
- Adanya dukungan kerjasama baik dari institusi Akademisi, LSM pemerhati lingkungan maupun dari negara-negara maju pemerhati lingkungan berupa studi dan transfer ilmu dan teknologi mengenai usaha pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.
- Adanya standard Internasional dan Standard Nasional dibidang pengelolaan lingkungan

b. Ancaman (Threats)

- Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan.
- Waktu kritis atau titik jenuh dari kemampuan alam dalam menampung/menghadapi laju kerusakan dan pencemaran lingkungan akan sangat berpengaruh pada perencanaan program yang akan semakin kompleks, biaya yang semakin tak terjangkau, lama dan kemampuan menanggulangi dampak yang terjadi.
- Adanya pola pemikiran (mindset) dari sebagian masyarakat baik dari kalangan industri maupun masyarakat umum untuk tetap menghalalkan segala cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena alasan desakan atau motif keuntungan ekonomi yang lebih besar., tanpa memperhatikan lingkungan dan generasi akan datang

Paradigma atau pemikiran-pemikiran yang keliru seperti ini meskipun dalam prosentase yang kecil dari pelaku usaha sedikit banyak akan memberikan dampak yang tidak bisa diremehkan dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Padahal dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tersebut semua aspek dan parameter pendukung seperti peningkatan kesadaran masyarakat, kerjasama antar sektor terkait, kebijakan dan aturan yang harus diterapkan harus didukung secara bulat oleh semua pihak yang berkepentingan.

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.
- Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik dan emisi kendaraan bermotor.
- Jumlah beban pencemaran dari industri dan kegiatan usaha lain baik skala besar, menengah maupun kecil.
- Titik Jenuh / Waktu Kritis Kemampuan Alam

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Barito Kuala

Analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala untuk tahun 2017 ditetapkan melalui proses internal tanpa mengkesampingkan usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat. Sehingga Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada prinsipnya tidaklah jauh berbeda, .

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Hasil Perumusan Musrenbang Kecamatan Tahun 2019 terdapat beberapa Usulan Kegiatan yang terkait dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup Adapun Program yang diusulkan masyarakat dapat dilihat pada **Tabel 2.3.**

Tabel 2.3

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	Sosialisasi Kebijakan pencegahan kebakaran hutan	Kecamatan Mandastana	Jumlah Pengadaan plang himbauan	5 buah	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menlhk-Setjen/2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019; "Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional."

Untuk mencapai tujuan dimaksud Kementerian LHK menetapkan beberapa sasaran diantaranya :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) menjadi sebesar 66,5 - 68,5 pada tahun 2019.
2. Meningkatnya role model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan
3. Meningkatnya penanganan perubahan iklim, baik berupa kegiatan mitigasi untuk menurunkan emisi GRK sebesar mendekati 26% pada tahun 2019 di lima sektor prioritas, yaitu: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, maupun kegiatan adaptasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di 15 (lima belas) daerah rentan
4. Meningkatnya sistem peringatan dini cuaca dan iklim, serta kebencanaan
5. Tersedianya data dan informasi untuk mendukung penanganan perubahan iklim

6. Meningkatnya kecepatan dan akurasi data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG).
7. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
8. Memperkuat kapasitas pengelolaan lingkungan hidup

Adapun porogram-program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah :

- Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
- Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
- Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
- Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
- Program Pengendalian Perubahan Iklim
- Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Program Planologi dan Tata Lingkungan
- Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

Dalam mewujudkan Sinkronisasi Visi-Misi, tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, Dinas Lingkungan Hidup akan melaksanakan strategi-strategi dan kebijakan yang terkait dengan kebijakan Nasional melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat daerah

Tujuan Kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup adalah “ Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pembangunan desa dan penataan kota yang berkualitas sesuai dengan tata ruang”. Sedangkan sasarannya adalah “ Meningkatkan kualitas daya tampung dan daya dukung lingkungan”

Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, maka untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Barito Kuala menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan

“ Meningkatkan kualitas lingkungan Hidup untuk Pembangunan Yang berkelanjutan”

Sasaran

“ Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Melalui Penurunan Pencemaran Air, Udara dan tanah serta mengoptimalkan fungsi lahan

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan Pelayanan Administrasi Lingkup

Dinas Lingkungan Hidup. Untuk mewujudkan tujuan program ini dirumuskan dalam 11 kegiatan diantaranya;

- Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

- Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
- Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
- Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
- Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program ini dimaksudkan untuk Memperlancar Kegiatan Pelayanan Perkantoran,

Untuk mewujudkan tujuan program ini dirumuskan 6 kegiatan diantaranya.

- Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
- Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
- Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
- Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program ini dimaksudkan untuk Menyediakan aparatur yang handal pada bidangnya ,Untuk mewujudkan tujuan program ini dirumuskan 1 kegiatan yaitu:

- Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan

Program ini dimaksudkan meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan 2 kegiatan yaitu:

- Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Kegiatan penyusunan laporan akhir tahun

5. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Program ini dilaksanakan untuk dengan tujuan untuk meningkatkan Penanganan/pengelolaan Persampahan di kabupaten Barito kuala melalui penurunan timbulan sampah . Untuk mewujudkan tujuan program ini maka akan dilakukan kegiatan antara lain :

- Kegiatan peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- Kegiatan bimbingan teknis persampahan
- Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

6. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Program ini dilaksanakan untuk dengan tujuan untuk meningkatkan Promosi kepada masyarakat luas tentang lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan program ini didukung 1 kegiatan yaitu :

- Kegiatan penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah

7. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Program ini dilaksanakan untuk dengan tujuan untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup melalui pengendalian pencemaran air, udara dan tanah di Kabupaten Barito Kuala. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka akan dilakukan kegiatan antara lain :

- Kegiatan koordinasi penilaian kota sehat/adipura
- Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan
- Kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
- Kegiatan pengelolaan B3 dan Limbah B3
- Kegiatan pengkajian dampak lingkungan
- Kegiatan pengembangan produksi ramah lingkungan
- Kegiatan koordinasi penyusunan Amdal
- Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
- Kegiatan peringatan hari-hari lingkungan hidup
- Kegiatan peningkatan kapasitas SDM pengelolaan lingkungan hidup provinsi:kab/kota

8. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Program ini dilaksanakan untuk dengan tujuan untuk meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka akan dilakukan kegiatan antara lain :

- Kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim

9. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

- Rehabilitasi hutan dan lahan

10. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

- Kegiatan peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

- Kegiatan pengembangan data dan informasi lingkungan
- Kegiatan penyusunan status lingkungan hidup daerah(SLHD)

11. Program peningkatan pengendalian polusi

- Kegiatan pengujian emisi kendaraan bermotor
- Kegiatan penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
- Kegiatan peningkatan pengelolaan laboratorium lingkungan

12. Program pengendalian kebakaran hutan

- Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan

13. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Program ini dilaksanakan untuk dengan tujuan untuk meningkatkan Proporsi RTH Publik pada wilayah perkotaan. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka akan dilaksanakan 1 kegiatan yaitu:

- Kegiatan pemeliharaan RTH

Tabel 3.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020(Rancangan Awal)
KABUPATEN BARITO KUALA**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
0	Non Urusan										
0	-										
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		528.318.754						
0	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	KabupatenJumlah surat masuk dan keluar yang dikelola/pengarsipan kantor	2 jenis	4.521.000	-	2 jenis	5.200.000
0	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah langganan listrik,PDAM, dan telpon	12 bulan	42.273.000	-	12 bulan	48.613.950

0	0	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	jumlah biaya pajak STNK dan KIR mobil/kendaraan yang dibayar	16 buah	7.370.000	-		16 buah	8.475.500
0	0	1	8	Penyediaan jasa kebersihan	SKPD	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan dan jumlah tenaga kebersihan yang di sediakan	17 jenis	40.778.400	-		17 jenis	36.426.850
0	0	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah jenis alat tulis kantor	26 jenis	44.942.750	-		27 jenis	49.427.848
0	0	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah jenis berkas kantor dan jumlah penggandaan yang disediakan	10 jenis/lembar	31.523.415	-		11 jenis/lembar	34.675.756
0	0	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah jenis pembelian komponen listrik penerangan gedung kantor	8 jenis	2.890.705	-		9 jenis	3.179.776
0	0	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	SKPD	Jumlah penyediaan surat kabar harian/media cetak	3 eks	4.158.000	-		3 eks	4.573.800

0	0	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah porsi makan dan minum untuk harian pegawai,tamu, dan rapat	9.592 porsi	45.210.742	-		9.592 porsi	49.731.816
0	0	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 laporan	212.940.000	-		1 laporan	233.476.320
0	0	1	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah		Jumlah laporan kegiatan koordinasi tertentu dengan kecamatan	1 laporan	46.500.000	-		1 laporan	51.074.100
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				360.635.000				
0	0	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah pengadaan kendaraan roda 2	2 unit	42.490.000	-		1 unit	25.000.000
0	0	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	jumlah pembelian peralatan gedung kantor	28 buah	78.750.000	-		28 buah	86.625.000
0	0	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara dengan kondisi baik	2 unit	47.713.000	-		2 unit	52.484.355

0	0	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas roda 2, 3, dan 4 yang siap operasional	9 unit	63.912.000	-		9 unit	79.056.516
0	0	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dan siap operasional	33 buah	19.200.000	-		33 buah	21.344.400
0	0	2	30	Pemeliharaan rutin/berkala taman,tempat parkir dan halaman	SKPD	Jumlah luasan taman di lingkungan kantor yang dipelihara dan kondisi representatif	3 lokasi	108.570.000	-		3 lokasi	119.795.445
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				55.000.000				
0	0	5	1	Pendidikan dan pelatihan formal		Jumlah PNS yang ditugaskan mengikuti Diklat dan mengikat kompetensinya	3 orang	55.000.000	-		4 orang	27.951.000
0	0	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				44.100.000				
0	0	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD	Jumlah dokumen (SAKIP) SKPD yang benar dan tepat waktu	9 dokumen	40.000.000	-		9 dokumen	26.816.539

0	0	6	4	Penyusunan laporan akhir tahun	SKPD	Jumlah dokumen/laporan keuangan akhir tahun dan dokumen aset SKPD yang benar dan tepat waktu	1 laporan	4.100.000	-		1 laporan	4.446.750
2				Pilihan								
2	30			Energi dan Sumber Daya Mineral								
2	30	15		Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan				11.000.000				
2	30	15	5	Pengawasan terhadap pelaksanaan terhadap kegiatan penambangan galiansi	Kabupaten	Jumlah Badan usaha yang diawasi	3 badan usaha	11.000.000	-		5 badan usaha	13.000.000
2	30	16		Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan				4.000.000				
2	30	16	1	Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan	Kabupaten	Jumlah masyarakat yang diawasi dalam melakukan pertambangan	3 orang	4.000.000	-		2 orang	4.400.000
2	30	17		Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan				79.200.000				

2	30	17	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah aparatur yang terampil di bidang ketenagalistrikan	3 orang	72.600.000	-		3 orang	79.860.000
2	30	17	17	Inventarisasi penerangan jalan umum (PJU)	Kabupaten	Jumlah penerangan jalan umum yang diinventarisir	3 desa	6.600.000	-		5 desa	7.700.000
4												
4	11			Lingkungan Hidup								
4	11	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				215.100.000				
4	11	15	2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Cerbon	Jumlah bank sampah yang terbentuk	1 unit	12.100.000	-		1 unit	13.310.000
4	11	15	4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Cerbon	Jumlah bank sampah induk yang dikelola	1 buah	6.000.000	-		1 buah	3.300.000
4	11	15	6	Bimbingan teknis persampahan	Barambai, Cerbon, Rantau Badauh, Tabukan	Jumlah KK yang paham tentang pengurangan penurunan sampah	30 orang	35.000.000	-		30 orang	38.500.000

4	11	15	7	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Kabupaten	Jumlah petugas yang terampil dalam pengelolaan persampahan	2 orang	12.000.000	-		2 orang	12.000.000
4	11	15	11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Anjir Muara, Anjir Pasar, Alalak, Marabahan, Rantau Badauh	Jumlah bank sampah yang terbentuk dan aktif	8 kelompok	150.000.000	-		8 kelompok	165.000.000
4	11	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				1.068.583.950				
4	11	16	1	Koordinasi kota sehat/Adipura	Mandastana, Marabahan	Jumlah desa yang dibina	100 persen	150.000.000	-		100 persen	165.000.000
4	11	16	3	Pemantauan kualitas lingkungan	Anjir Pasar, Barambai, Kuripan, Marabahan, Tabukan, Tamban, Alalak	Jumlah sampel pemantauan air udara ambien	2 laporan	43.820.150	-		2 laporan	48.202.165
4	11	16	4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Cerbon, Kuripan, Mandastana, Marabahan, Tabukan, Alalak, Tabunganen, Bakumpai, Tamban, Wanaraya, Barambai	Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan Jumlah pengaduan masyarakat yang dimediasi / difasilitasi	1 laporan 0	89.612.600	-		1 laporan 0	98.573.860

4	11	16	6	Pengelolaan B3 dan limbah B3	Marabahan, Tabunganen, Tamban, Alalak, Anjir Pasar	Jumlah perusahaan yang melakukan pengelolaan B3	12 perusahaan	8.000.000	-		13 perusahaan	2.662.000
4	11	16	7	Pengkajian dampak lingkungan	Kabupaten	Jumlah anggota sekretariat komisi/tim teknis dan komisi penilai Amdal yang kompeten	27 dokumen	120.000.000	-		27 dokumen	135.000.000
4	11	16	11	Pengembangan produksi ramah lingkungan	Kabupaten	Jumlah KK yang memanfaatkan limbah untuk energy	10 KK	260.000.000	-		10 KK	260.000.000
4	11	16	13	Koordinasi penyusunan Amdal	Kabupaten	Jumlah masyarakat yang paham tentang pengelolaan lingkungan	20 orang	36.300.000	-		20 orang	39.930.000
4	11	16	14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Kabupaten, Rantau Badauh	Kelompok masyarakat peduli lingkungan yang terbentuk	70 anggota	112.851.200	-		70 anggota	124.136.320

4	11	16	17	Peringatan hari-hari lingkungan hidup	Kabupaten	Jumlah pelaksanaan hari-hari lingkungan hidup dan pameran pembangunan	4 acara	200.000.000	-		4 acara	146.410.000
4	11	16	19	Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan lingkungan hidup provinsi kab/kota		Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis lingkungan dan berkompeten dibidangnya	3 orang	48.000.000	-		4 orang	43.923.000
4	11	17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				60.000.000				
4	11	17	5	Pengendalian dampak perubahan iklim	Kabupaten	Jumlah pohon yang ditanam di wilayah Kab. Batola	500 pohon	60.000.000	-		750 pohon	66.000.000
4	11	17	6	Pengendalian kerusakan hutan dan lahan	SKPD	Jumlah dokumen informasi status kerusakan lahan	1 dokumen	0	-		1 dokumen	0
4	11	18		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam				75.225.700				
4	11	18	3	Rehabilitasi hutan dan lahan	Tabunganen	Jumlah pohon yang ditanam dikawasan pesisir	1.500 pohon	75.225.700	-		2.000 pohon	82.748.270
4	11	19		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				171.800.000				

4	11	19	1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Mandastana, Tabunganen, Alalak, Anjir Muara, Anjir Pasar	Jumlah sekolah yang dibina	4 sekolah	75.000.000	-		6 sekolah	85.000.000
4	11	19	2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	SKPD	Jumlah laporan Menuju Indonesia Hijau	1 dokumen	42.350.000	-		1 dokumen	46.600.000
4	11	19	6	Penyusunan status lingkungan hidup daerah (SLHD)	SKPD	Jumlah laporan status lingkungan hidup daerah (SLHD)	1 laporan	54.450.000	-		2 laporan	59.895.000
4	11	20		Program Peningkatan Pengendalian Polusi				160.650.250				
4	11	20	1	Pengujian emisi kendaraan bermotor	Marabahan	Jumlah sampel uji emisi sumber bergerak	120 buah	10.000.000	-		130 buah	10.100.000
4	11	20	2	Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri	Kabupaten	Jumlah sampel uji emisi sumber tidak bergerak	5 perusahaan	20.000.000	-		5 perusahaan	22.000.000
4	11	20	5	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Marabahan	Jumlah masyarakat yang paham tentang pengendalian polusi pencemaran	30 orang	19.300.000	-		30 orang	21.230.000

4	11	20	7	Peningkatan pengelolaan laboratorium lingkungan	Marabahan	Jumlah sampah yang masuk ke laboratorium	1 laporan	111.350.250	-		1 laporan	122.485.275
4	11	22		Program Pengendalian kebakaran hutan				60.957.380				
4	11	22	5	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	Kabupaten	Jumlah masyarakat yang paham tentang pencegahan kebakaran hutan	40 orang	60.957.380	-		40 orang	67.100.000
4	11	24		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)				66.183.700				
4	11	24	6	Pemeliharaan RTH	Marabahan	Jumlah luas RTH yang dipelihara	1.650 pohon	66.183.700	-		1.800 pohon	72.802.000
						TOTAL		2.915.543.992				0

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala adalah **Program Tahunan** Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala ini menjadi Bahan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019, yang memfokuskan kegiatan pada Pengembangan Pengelolaan Persampahan, Pengendalian pencemaran perusakan lingkungan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, rehabilitasi pemulihan cadangan sumber daya alam dan peningkatan kualitas akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Marabahan, Juli 2018

KEPALA DINAS

HJ. FAHRIANA,SH,MH
Pembina Utama Muda
NIP 19650414 198601 2 003

